



MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

Siktania Maria Dilliana, S.Akun., M.Si., Ak
Henrikus Herdi, SE., M.S.A

MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH



Biografi



Siktania Maria Dilliana, S.Akun., M.Si, Ak lahir di Dilli, pada tanggal 30 Mei 1994. Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Yohanis Y.Gobang dan Ibu Theresia Fransiska Golang. Pendidikan yang ditempuh mulai dari Tingkat Sekolah Dasar Inpres (SDI)Waiklau pada Tahun 2006, SMPK Binawirawan Maumere Pada Tahun 2009 dan SMAN 2 Maumere pada Tahun 2012. Setelah itu menamatkan Pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusa Nipa Indonesia pada Tahun 2016.



Henrikus Herdi, SE., M.S.A, lahir di Delang, pada tanggal 03 Maret 1984. Ia merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Firmus Matheus dan Ibu Beata Sensiana. Pendidikan yang ditempuh mulai dari Tingkat Sekolah Dasar Khatolik (SDK) Delang tamat Tahun 1996, SMPK St.Yohanes Nelle tamat Tahun 1999 dan SMK.St.Gabriel Maumere tamat Tahun 2002. Setelah itu menamatkan Pendidikan Sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi STIE OeMathonis Kupang Tahun 2007.



eureka
media utama
Anggota IKAPI

☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-037-4



9 786234 870374

MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

Siktania Maria Dilliana, S.Akun., M.Si.,Ak
Henrikus Herdi, SE., M.S.A



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

Penulis : Siktania Maria Dilliana, S.Akun., M.Si., Ak
Henrikus Herdi, SE., M.S.A

Editor : Dwi Winarni, S.E., M.Sc.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Budi Wahyono, S.Pd.I.

ISBN : 978-623-487-037-4

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "Manajemen Keuangan Daerah". Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dokumen anggaran daerah seringkali disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Salah satu alat yang dapat digunakan dalam melakukan analisa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah analisa rasio yang secara luas telah digunakan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik masih sangat terbatas dikarenakan keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	v
BAB 2 PENGELOLAAN ANGGARAN.....	12
A. Stewardship Theory.....	12
B. Anggaran Sektor Publik	14
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	15
BAB 3 DANA PERIMBANGAN.....	17
A. Dana Bagi Hasil	17
B. Dana Alokasi Umum	18
C. Dana Alokasi Khusus.....	19
BAB 4 KEUANGAN DAERAH	20
A. Belanja Daerah	20
B. Kinerja Keuangan Daerah.....	24
C. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	28
D. Pertumbuhan Ekonomi.....	30
BAB 5 PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP SISTEM KEUANGAN DAERAH.....	35
A. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	35
B. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	37
C. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kinerja Keuangan.....	39
BAB 6 PENGARUH KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	40
A. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 40	
B. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	41
C. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Kinerja Keuangan Daerah	42

DAFTAR PUSTAKA	44
TENTANG PENULIS.....	50



MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

Siktania Maria Dilliana, S.Akun., M.Si., Ak
Henrikus Herdi, SE., M.S.A



BAB

1

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan perkapita serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Mosey, 2016). Menurut Putong (2013:411) pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan *output*.

Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan produk domestik regional bruto (PDRB) untuk wilayah propinsi. Pertumbuhan dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan daerah yang dapat menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian suatu daerah. Semakin besar sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB maka daerah dapat melaksanakan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik dan yang berarti pula akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Prishardoyo:2008).

Pertumbuhan ekonomi merupakan kemajuan produksi barang dan jasa melalui perkembangan aktivitas perekonomian dalam masyarakat (Sukirno, 2010:9). Secara umum pertumbuhan ekonomi suatu daerah di cirikan dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur sektor publik yang nantinya

BAB

2

PENGELOLAAN ANGGARAN

A. Stewardship Theory

Stewardship theory sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan) (Davis and Donaldson, 1991). Teori *Stewardship* didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seorang manajer tidak memiliki kepentingan individu, tapi lebih mengupayakan kepentingan dan keinginan prinsipal serta mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik (Raharjo, 2007).

Menurut Putro (2013) teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. *Stewardship theory* memandang bahwa pihak manajemen dalam organisasi pemerintah daerah diasumsikan sebagai *stewards*/penatalayanan yang bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tujuan organisasi, menggunakan pendekatan *governance* atas dasar psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para penulis untuk menguji situasi

BAB

3

DANA

PERIMBANGAN

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kelompok pendapatan dana perimbangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

A. Dana Bagi Hasil

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

BAB

4

KEUANGAN DAERAH

A. Belanja Daerah

Menurut Bastian (2006) belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pelayanan umum. Pengertian belanja menurut PSAP No.2 Paragraf 7 adalah “semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri no.59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan peraturan menteri dalam negeri no. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua.

“Belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 tentang standar

BAB 5

PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP SISTEM KEUANGAN DAERAH

A. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah daerah telah diberikan ruang gerak untuk melakukan improvisasi pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan daerah, namun dana yang digunakan sebagai upaya dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi daerah dirasa masih kurang dalam rangka mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh daerah. Hal tersebut karena dukungan melalui kementerian keuangan khususnya direktorat jenderal perimbangan keuangan kepada daerah yang dilakukan melalui mekanisme politik anggaran di DPR RI belum maksimal.

Dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang mendominasi sehingga pemerintah daerah merasa masih terpenuhi kebutuhannya. Hal ini membuat pemerintah daerah kurang terpacu untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah meningkat maupun menurun tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi

BAB 6

PENGARUH KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Alokasi belanja pemerintah baik melalui alokasi belanja langsung maupun alokasi belanja tidak langsung dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan signifikan, hal ini dikarenakan meski pengalokasian dana belanja dari pemerintah baik belanja langsung maupun tidak langsung yang terus naik dan tumbuh setiap tahunnya berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi bahkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh dengan perubahan alokasi anggaran dari belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur penunjang perekonomian akan mendorong tingkat produktifitas penduduk yang mana akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum tercermin dalam pendapatan per kapita.

Di daerah, adanya pembangunan prasarana yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi seperti untuk sektor infrastruktur seperti adanya pembangunan jalan raya dan pembangunan bendungan serta untuk sektor pendidikan adanya 86 paket pembangunan perpustakaan sekolah dan pengerjaan rehabilitas sekolah. Pada sektor jasa kesehatan adanya peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dimana adanya pembangunan puskesmas di beberapa daerah terpencil di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul, H., & Muhammad, S. K. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul, H., & Muhammad, S. K. 2012. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Adyatma, Erdi dan Oktaviani, Rahmawati Meita. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi". ISSN 1979-4878, Volume 4 Nomor 2 Nopember 2015.
- Amrozi, Imam Akhmad. 2016. "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur)". Vol. I, No. 1. ISSN 2502-3764.
- Andirfa, Mulia. Basri M. Com, CA, Dr Hasan dan A. Majid, SE, M. Ec, Dr. M. Sabri. 2016. "Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh".
- Ardaya Garini. 2015. "Pengaruh Belanja Daerah, Temuan Audit dan Size Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, 2017. Sikka Dalam Angka. BPS Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014–2018. BPKAD Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. 2011. *Akuntansi Sektor Publik* (2ed). Jakarta:Salemba Empat.
- Donaldson, L., & Davis, J.H. 1989. CEO governance and shareholder returns: Agency theory or stewardship theory. *Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management*, Washington, DC.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Febrianty, Sylvia, dkk. 2012. “Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Selatan”.
- Gamayuni, Rindu Rika, 2016. “The effect of Local Government Characteristic and the Examination Result of Indonesian Supreme Audit Institution on Economic Growth, with Financial Performance as Intervening Variable in District and City Government of Lampung Province”. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol 7, No. 18, hal 1-7. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online).
- Gideon, Simanullang. 2013. “Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keunagn Daerah”. *Umrah Journal Of Accounting* Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013, Halaman 1-22.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS19*. Edisi 5. Badan Penerbit Universitas

Diponegoro-Semarang Gulo, W. 2010. *Metodologi Penelitian*. Grasindo: Jakarta

Indarto, Muhammad. 2011. "Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer ke Daerah dalam APBN terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah" (*tesis*) program MPKP. Universitas Indonesia.

Lestari L F Simanjuntak, Ahmad Subeki, Ika Sasti Ferina, dan Hasni Yusrianty 2013, "Analysis Of Flypaper Effect In General Allocation Fund And regional original Income To Regional Expenditure Of Districtsand Cities In South Sumatera".

Lucky, Dihan. 2014. Analysis of the effect of regional Financial Performance to economic growth and proverty though capital expenditure. *E jurnal EP Unud* 3[5]: 201-208.

Mahmudi. 2016. *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.

Marinus, Manek Dan Rudy Badrudin. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Telaah Bisnis*. Volume 17 Nomor 2.

Mawarni, dkk. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh)". *Jurnal Akuntansi Volume 2*, No.2: 80-90.

Mosey. G.B.D. 2016. "Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Minahasa antara tahun2004-2013". *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*.

- Ni Ketut Erna Rahmawati, dan I Wayan Putra. 2012. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012-2012". *E-Jurnal akuntansi Universitas Udayana*, Vol.15 No.3, Juni 2016: 1767 -1795. Tersedia di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17858>, diakses pada 15 September 2017.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurlis. 2016. The Factors Affecting of the Capital Expenditure Allocation Case: The Local Government of Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting* ISSN 2222 - 1697(paper) ISSN 2222-2847 (online). vol 7 no.1
- Prantini. 2014. "Analisis Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat" (*Tesis*). Magister Ekonomi (M.E) pada Program Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura.
- Prasasti, Swastika Enjang. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah".1-12.
- Prakarsa, Febrian Dwi. 2014, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012)", *Jurnal Ilmiah*, Agustus.
- Prihastuti, Taufik dan Agusti. 2015. "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/kota Riau". *Jurnal Sorot*. Volume 10 Nomor 2.
- Puspitaningsih dan Aryani M. 2016. "Kinerja Keuangan Daerah sebagai Pemoderasi Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi". *E-Jurnal*

Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.3(2016):2213-2239.
ISSN 2302-8556.

Putong , Iskandar. 2013. *Economics Pengantar Mikro dan Makro*.
Jakarta : Mitra Wacana Media.

Putro, Prima Utama Wardoyo. 2013. "Pengaruh PDRB dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD Sebagai Variabel Intervening". Universitas Negeri Semarang.

Raharjo, Eko, 2007. *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*, diunduh dari aristiepena.ac.id/wp-content/uploads/.../pena-fokus-vol-2-no-1-37-46.pdf

Rahmawati, N.K.E dan Putra, I.W. (2016). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012". *E-Jurnal Akuntansi*. XV(3). 1767-1795.

Rukmana, Wan Vidi. 2013. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau". *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Hal 1-15.

Santosa, Budi. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia". *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Universitas Trisakti Jakarta.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Sinaga, B.M. dan H.Siregar. 2005. "Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia". Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Suardana, Ida Bagus Raka dan I Putu Astawa. 2017. "Flypaper Effect of General Allocation Fund (DAU) and Human Development Index (IPM) (A Case Study In Regencies and

Municipality in Bali)". *Archives of Bussiness Research*. Vol.5. No.5.

Sujarweni, V.Wiratna. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi kesembilan, jilid I). Jakarta : Erlangga

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2015 tentang Keuangan Daerah. Jakarta.

Widjaja, HAW.2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Widiasih, Ni Nyoman & Gayatri. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana", Vol. 18 No. 3

TENTANG PENULIS

Penulis I



Siktania Maria Dilliana, S.Akun., M.Si, Ak lahir di Dilli, pada tanggal 30 Mei 1994. Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Yohanis Y.Gobang dan Ibu Theresia Fransiska Golang. Pendidikan yang ditempuh mulai dari Tingkat Sekolah Dasar Inpres (SD)Wairklau pada Tahun 2006, SMPK Binawirawan Maumere Pada Tahun 2009 dan SMAN 2 Maumere pada Tahun 2012. Setelah itu menamatkan Pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusa Nipa Indonesia pada Tahun 2016.

Setelah menamatkan pendidikan S1, wanita ini bekerja di Universitas Nusa Nipa Indonesia pada Tahun 2017. Pada Tahun 2017 wanita ini dipercayakan oleh Universitas Nusa Nipa Indonesia untuk melanjutkan Program Pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Akuntansi dengan bidang keahlian Akuntansi Keuangan dan Auditing dan Lulus Tahun 2020 di Universitas Udayana Denpasar Bali. Di bulan Maret Tahun 2020 wanita ini kembali bertugas dan menjadi Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusa Nipa Indonesia.

Penulis II



Henrikus Herdi, SE., M.S.A, lahir di Delang, pada tanggal 03 Maret 1984. Ia merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Firmus Matheus dan Ibu Beata Sensiana. Pendidikan yang ditempuh mulai dari Tingkat Sekolah Dasar Khatolik (SDK) Delang tamat Tahun 1996 , SMPK St.Yohanes Nelle tamat Tahun 1999 dan SMK.St.Gabriel

Maumere tamat Tahun 2002. Setelah itu menamatkan Pendidikan Sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi STIE OeMathonis Kupang Tahun 2007.

Setelah menamatkan pendidikan S1, pria ini bekerja di Universitas Nusa Nipa Indonesia pada Tahun 2008. Pada Tahun 2011 pria ini dipercayakan oleh Universitas Nusa Nipa Indonesia untuk melanjutkan Program Pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Akuntansi dengan bidang keahlian Akuntansi Keuangan dan Auditing dan Lulus Tahun 2013 di Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Sekarang pria ini juga sedang menempuh Pendidikan Doktoral Ilmu Manajemen di Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, sejak tahun 2020. Pria ini dalam keseharian bekerja sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusa Nipa Indonesia, sejak tahun 2008, dan juga dipercayakan sebagai Ketua Program Studi Akuntansi sejak Tahun 2013 hingga sekarang. Pria ini juga dalam kemasyarakatan di percayakan sebagai Pengawas di Koperasi Simpan Pinjam KSP.KOPDIT TUKE JUNG, sejak tahun Tahun 2017 hingga sekarang.